



RENCANA
KERJA
2020

DIREKTORAT
KAWASAN
KONSERVASI



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Sesuai amanat Undang-Undang nomor: 17 tahun 2003 tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020 merupakan prasyarat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bertanggungjawab. Rencana Kerja merupakan penjabaran program dan sasaran dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Kawasan Konservasi selama tahun 2020. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya kepada semua pihak meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga dokumen ini dapat tersusun. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalasnya.

Jakarta, Desember 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika	8
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019.....	16
1. Capaian Kinerja sampai dengan 2018	16
2. Prognosis Tahun 2019.....	19
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2020	24
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional	24
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020	26
BAB IV. PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi Berdasarkan Sub Direktorat.....	12
Tabel 2 . Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 3 . Capaian IKK Direktorat Kawasan Konservasi 2018.....	18
Tabel 4 Penetapan Kinerja Direktorat Kawasan Konsevasi 2019	19
Tabel 5 . Prognosis Capaian IKK Drektorat Kawas Konservasi Tahun 2019	21
Tabel 6 . Prioritas Nasional 2020 yang didukung Direktorat Kawasan Konservasi	24
Tabel 7 . Target Capaian IKK Direktorat Kawasa Konservasi tahun 2020	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Struktur Organisasi Direktorat Kawasan Konservasi.....	12
Gambar 2 . Peta Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan.....	13
Gambar 3 . Indikator Kinerja Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.....	17
Gambar 4 . Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan jenis belanja	28
Gambar 5 . Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan Sumber dana	29



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika

1. Latar Belakang

Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan sesuai tugas pokok serta fungsinya, Direktorat Kawasan Konservasi mengemban sebagian tugas pemerintah dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya terkait pengelolaan kawasan hutan konservasi (KSA/KPA/TB).. Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi selaku unit kerja Direktorat Jenderal KSDAE diberikan amanat untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan kawasan konservasi serta menetapkan pengelolaan dan pembinaan kawasan konservasi.

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020, disusun untuk memberikan gambaran rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya, dan berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Renja menjadi dasar dalam pengusulan kegiatan dan anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional seperti saat ini, diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut.

Sebagai tahun awal Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini lebih difokuskan pada penyesuaian rencana kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra.

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2020 ini memuat informasi tentang program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Dengan disusunnya Renja ini diharapkan indikator kinerja serta target capaiannya akan didukung oleh semua pihak terkait sehingga hasil yang dicapai dapat optimal sesuai yang dikehendaki untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Direktorat Kawasan Konservasi adalah :

1. Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
2. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program
3. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
4. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
5. Membantu dalam menetapkan target kinerja.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Direktorat Kawasan Konservasi merupakan salah satu unit kerja struktural Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 7 Jakarta Pusat.

2. Tugas Pokok

Sebagai, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah pengelolaan kawasan konservasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyanga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyanga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyanga taman hutan raya;
- 3) Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyanga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- 4) Supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyanga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Kawasan Konservasi memiliki 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Pada setiap Sub Direktorat terdiri atas 2 (dua) Seksi (Eselon IV). Tugas dari masing-masing Sub Direktorat Lingkup Direktorat Kawasan Konservasi, adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

2. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

3. Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi

Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

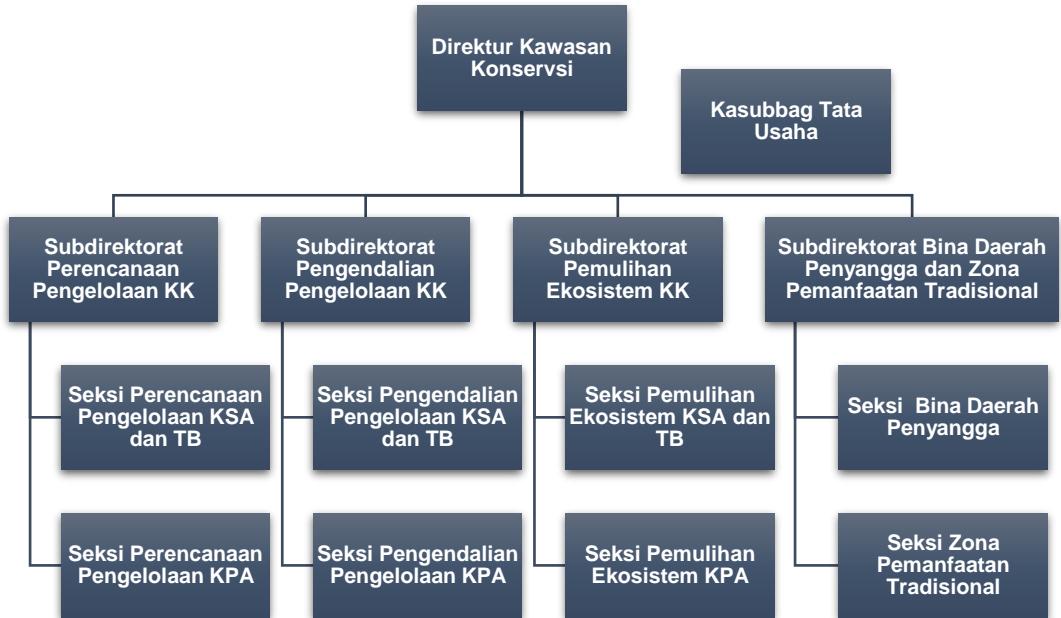
4. Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional

Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Kawasan Konservasi terdiri atas 4 (empat) unit struktural setingkat Eselon III dan 9 (sembilan) unit struktural setingkat Eselon IV berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan Konservasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh 53 orang pegawai, yang terdiri dari: PNS sebanyak 42 orang, dan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) sebanyak 11 orang. Penyebaran pegawai pada Direktorat Kawasan Konservasi adalah sebagaimana tabel berikut :

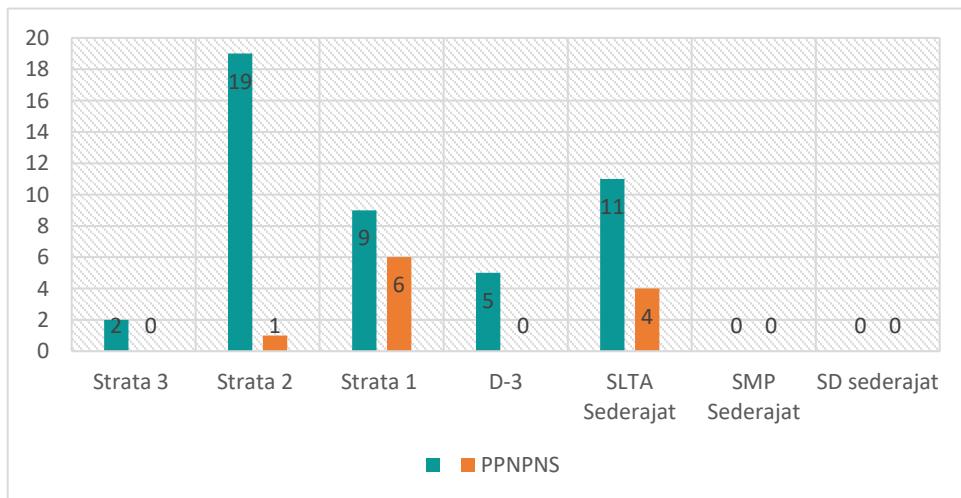
Tabel 1. Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi Berdasarkan Sub Direktorat

No	Sub Direktorat	Jumlah Orang		
		PNS	PPNPNS	Jumlah
1	Direktur	1	0	1

2	Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	7	2	9
	Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi	7	2	9
4	Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi	6	2	8
5	Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional	10	2	12
6	Sub Bagian Tata Usaha	11	3	14
	JUMLAH	42	11	53

Selain ke-53 orang pegawai tersebut terdapat 5 orang pegawai yang saat ini masih tercatat di Direktorat KK, namun mendapat penugasan di instansi lain (NGO dan BRG), sehingga jika dijumlahkan total pegawai adalah sebanyak 57 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM Direktorat Kawasan Konservasi didominasi oleh lulusan S-2 (Master) sebanyak 41,30% dan lulusan S-1 (Sarjana) sebanyak 19,56% serta S-3 (Doktor) sebanyak 4,35%. Data sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, disajikan dalam gambar dan tabel berikut.

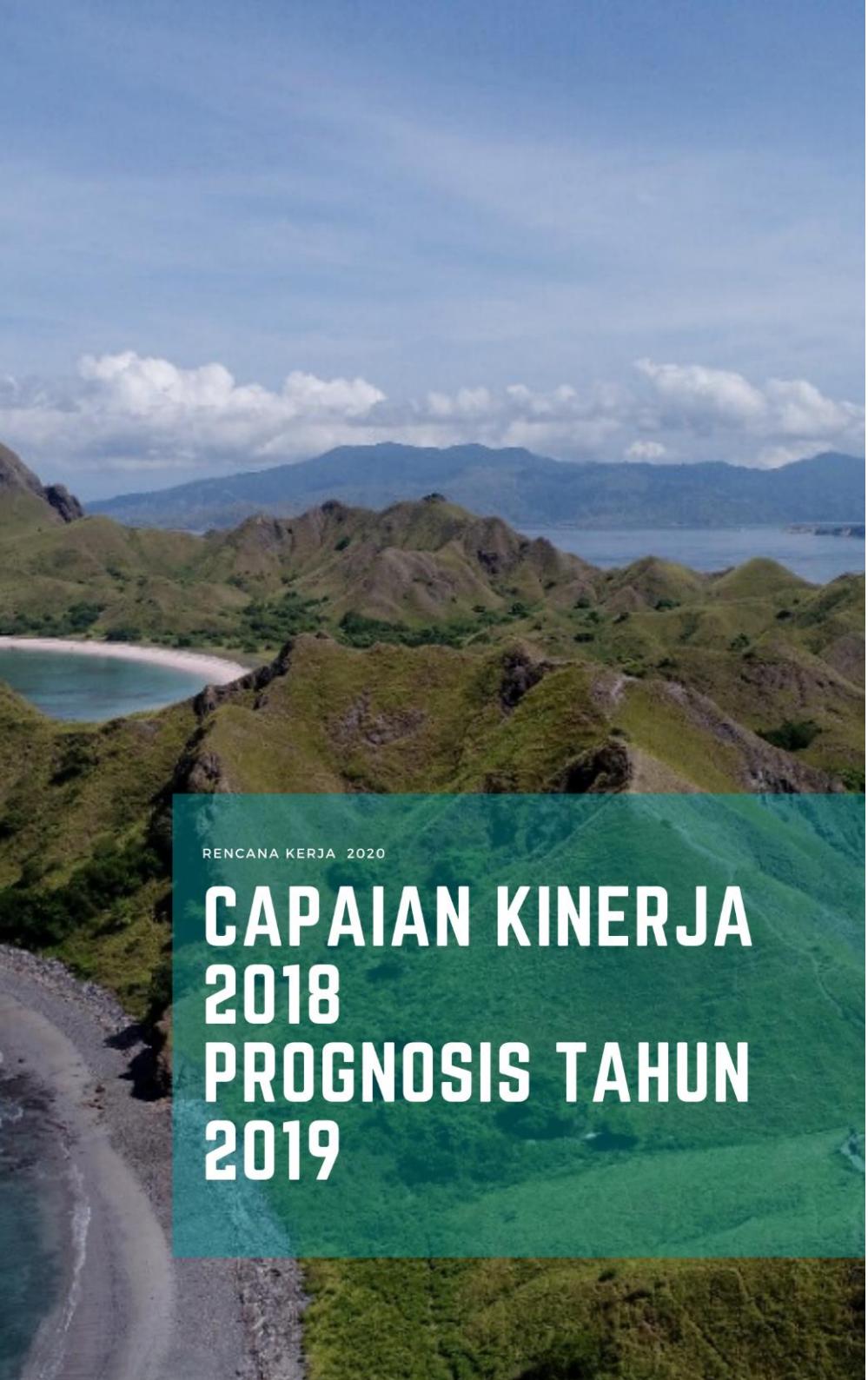


Gambar 2. Peta Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2. Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah		
		PNS	PPNPNS	Total
1.	Strata 3	2	0	2
2.	Strata 2	19	1	20
3.	Strata 1	9	6	15
4.	D-3	5	0	5
5.	SLTA Sederajat	11	4	15
6.	SMP Sederajat	0	0	0
7.	SD sederajat	0	0	0
	Jumlah	46	11	57

Komposisi tersebut tentunya sangat menunjang kebutuhan Direktorat Kawasan Konservasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan buah fikir dalam penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan kawasan konservasi.



RENCANA KERJA 2020

CAPAIAN KINERJA 2018 PROGNOSIS TAHUN 2019

BAB II. CAPAIAN KINERJA 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

1. Capaian Kinerja sampai dengan 2018

Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019, Direktorat Kawasan Konservasi memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai selama periode tersebut. Ketujuh IKK dan target tahunan yang harus dicapai disajikan sebagaimana gambar berikut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019								
No	IKK	Target RPJM	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	METT (minimal 70%)	260	50	100	150	200	260	Unit
2	Rencana Pengelolaan	150	30	60	90	120	150	Dokumen
3	Pemulihan Ekosistem	100.000	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000	Hektar
4	Desa Penyangga	77	77	77	77	77	77	Desa
5	Kemitraan	100.000	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000	Hektar
6	Operasional KPHK Non TN	100	20	100	100	100	100	Unit
7	Perlindungan Pengamanan	34	34	34	34	34	34	Provinsi

Keterangan : volume target sesuai Renstra Ditjen KSDAE dan Renstra Direktorat KK Tahun 2015-2019



Gambar 3. Indikator Kinerja Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

Pada tahun 2018 seluruh IKK telah melampaui target tahunannya. Berdasarkan target yang teruang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Kawasan Konservasi dengan Direktur Jenderal KSADAE, capaian kinerja rata-rata Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2018 adalah **142,86%**. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian kinerjanya sudah melampaui target yang diperjanjikan.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi pada tahun 2018 didukung dengan anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Rp.75.572.478.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.030.591.064,- atau 95,31%.

Capaian ketujuh IKK dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA/KPA dan TB; capaian kinerja tahun 2018 adalah 150% atau 75 unit dari 30 unit yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (260 unit), capaian akumulatif sampai dengan tahun 2018 sebanyak 155 unit atau 59,62%.
- b. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen; capaian kinerja tahun 2018 adalah 183,33% atau dibulatkan 150% atau 55 unit dari 30 unit yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (150 unit), capaian akumulatif sampai dengan tahun 2018 sebanyak 156 unit atau 104%.
- c. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha; capaian kinerja tahun 2018 adalah 161,03% dibulatkan 150% atau 32.205,4 ha dari 20.000 ha yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (100.000 Ha), capaian akumulatif sampai dengan tahun 2018 seluas 55.236,14Ha atau 55,24%
- d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun; capaian kinerja tahun 2018 adalah 301,30% atau dibulatkan 150% atau 232 desa dari 77 desa yang ditargetkan.

- e. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada Zona Tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha; capaian kinerja tahun 2018 adalah 201,59% atau dibulatkan 150% atau 40.318,13 Ha dari 20.000 Ha yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (100.000 Ha), capaian akumulatif sampai dengan tahun 2018 seluas 105.513,31 Ha atau 105,51%
- f. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit; capaian kinerja tahun 2018 adalah 343,33% atau dibulatkan 150% atau 103 unit dari 30 unit yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (100 unit), capaian akumulatif sampai dengan tahun 2018 seluas 103 Ha atau 103%.
- g. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi; capaian kinerja tahun 2018 adalah 100% atau 34 provinsi dari 34 provinsi yang ditargetkan.

Pencapaian target IKK Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2018 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Capaian IKK Direktorat Kawasan Konservasi 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 unit	75 unit	150%
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	55 Dokumen	150%
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	20.000 Ha	32.205,40 Ha	150%
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	232 Desa	150%

5	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	20.000 Ha	40.318,13 Ha	150%
6	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	30 Unit	103 Unit	150%
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
RATA-RATA				142,86%

2. Prognosis Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pada Tahun 2019 Direktur Kawasan Konservasi menandatangani Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan Program/Kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Terdapat sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2019 sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Direktorat KK Tahun 2019. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4 Penetapan Kinerja Direktorat Kawasan Konsevasi 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	TARGET TAHUNAN

1.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.	80 Unit
2.	Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di Pesisir dan Laut.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan.	50 Dokumen
3.	Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha.	17.697 Ha
4.	Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun.	77 Desa
			(186 kelompok)
5.	Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan taman nasional.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha.	13.200 Ha
6.	Beroperasinya KPHK pada kawasan konservasi.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK.	60 Unit
7.	Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	34 Provinsi
			(74 UPT)

Dalam mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut alokasi anggaran Direktorat Kawasan Konservasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.26.319.415.000,- (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu*

Rupiah), yang terdiri dari anggaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE sebesar Rp. 2.265.000.000,- dan anggaran teknis pengelolaan kawasan konservasi Rp. 24.054.415.000,-.

Prognosis capaian IKK Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2019 sesuai tugas dan fungsi Direktorat Kawasan Konservasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Prognosis Capaian IKK Direktorat Kawas Konservasi Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019	Prognosis 2019	Capaian
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	80 unit	100 unit	125%
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	50 Dokumen	55 Dokumen	110%
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	17.697 Ha	28.830,94 Ha	150%
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	146 Desa	150%
5	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	13.200 Ha	503.365,73 Ha	150%
6	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	60 Unit	106 unit	150%

7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
---	---	-------------	-------------	------



BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional

Terdapat 4 pilar pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam tujuh Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional (PN) yang didalamnya terdapat Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas Nasional (PPN). Didalam RPJMN 2020-2024 tersebut, Bidang KSDAE memberikan dukungan pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) yaitu: Prioritas Nasional (PN)-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan (PN)-2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Khusus yang terkait dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Prioritas Nasional 2020 yang didukung Direktorat Kawasan Konservasi

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target
Prioritas Nasional (PN) 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas				
Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan kawasan berfungsi lindung	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	500 Desa
		Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	554 unit KK
		Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	500 Desa

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target
		<i>Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)</i>	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	1,8 Juta Ha
Prioritas Nasional (PN)- 2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
PP 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan	KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1.200 Ha
	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<i>Pencegahan Kehilangan Keaneagaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem</i>	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	500 Desa
		<i>Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (open area)</i>	Luas <i>open area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	1,8 Juta Ha
	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<i>Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah</i>	Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	1,8 Juta Ha
		<i>Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)</i>	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	1,8 Juta Ha
Pembangunan Rendah Karbon	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Pengurangan laju deforestasi		
		<i>Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi</i>	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	554 unit KK
		<i>Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi</i>	Jumlah desa di kawasan konservasi	500 unit KK

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target
		<i>Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (open area)</i>	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	1,8 Juta Ha

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 ada 3 indikator kegiatan di Direktorat Kawasan Konservasi dalam rangka mendukung 2 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi, target 554 unit KK, dengan alokasi anggaran Rp. 1.674.330.000,-
2. Jumlah desa di kawasan konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, target 500 Desa dengan alokasi anggaran Rp. 1.553.802.000,-
3. Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani, target 1,8 juta Ha dengan alokasi anggaran Rp. 2.802.212.000,-

B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari kegiatan Pengelolaan Kawasan konservasi, yang menjadi tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi. Keempat IKK dan target Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Target Capaian IKK Direktorat Kawasa Konservasi tahun 2020

No.	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Terget Tahun 2020
5419	Kegiatan :Pengelolaan Kawasan Konservasi		
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.		
1	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona	Desa	500

	tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif		
2	Luas opened area di Kawasan konservasi yang ditangani	Hektar	1,8 Juta
3	Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihian Ekosistem	Hektar	20.000
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	554

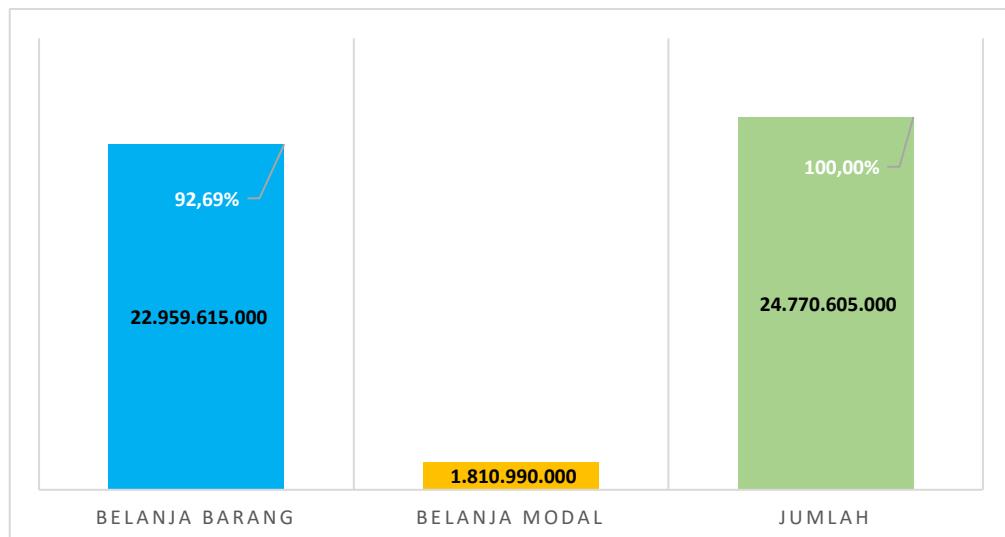
Pada tahun 2020 anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan di Pusat (Direktorat Kawasan Konservasi) sebesar Rp. **24.770.605.000**. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran kegiatan “Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru”, yang akan dilaksanakan melalui 6 Output kegiatan yaitu:

1. Dokumen Luas Area Kawasan Konservasi Yang Ditangani permasalahannya,
Komponen:
 - Laporan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi
2. Dokumen Desa Yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
Komponen:
 - Laporan Kemitraan Konservasi
 - Laporan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di Sekitar KK
3. Dokumen Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektifitas Pengelolaannya
Komponen:
 - Laporan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
 - Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan
4. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat KK
Komponen:
 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
6. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat KK

Komponen:

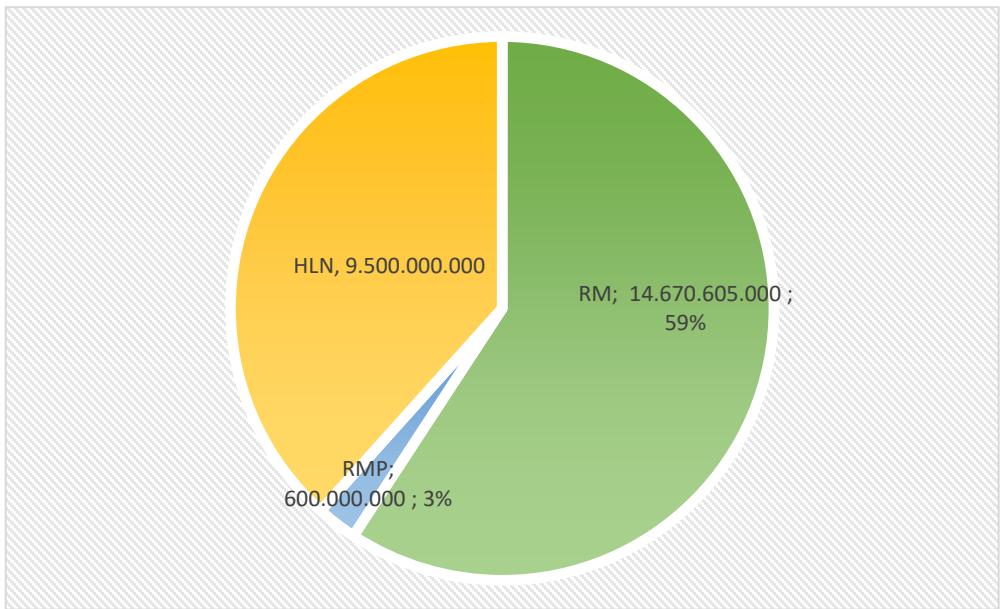
- Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Berdasarkan jenis belanjanya, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Direktorat Kawasan Konservasi 92,69% atau sekitar Rp. 22,96 miliar dialokasikan untuk Belanja Barang, dan sisanya sekitar Rp.1,8 miliar untuk Belanja Modal.Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan jenis belanja

Berdasarkan sumber dananya, 59% anggaran untuk kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi merupakan Rupiah Murni (RM), dan sisanya sebesar 38% merupakan anggaran dengan sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) yaitu untuk kegiatan *Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (BCCCP-GLE)*, sedangkan 2,42% merupakan Dana Pendamping berupa Rupiah Murni Pendamping (RMP) dari kegiatan BCCCP-GLE tersebut. Alokasi pagu anggaran berdasarkan sumber dananya dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan Sumber dana



RENCANA KERJA 2020

PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

Rencana kerja Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2020. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 Direktorat Kawasan Konservasi. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian-penesuaian sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 serta Rancangan APBN Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE, khususnya terkait Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Rencana Kerja ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020.

LAMPIRAN

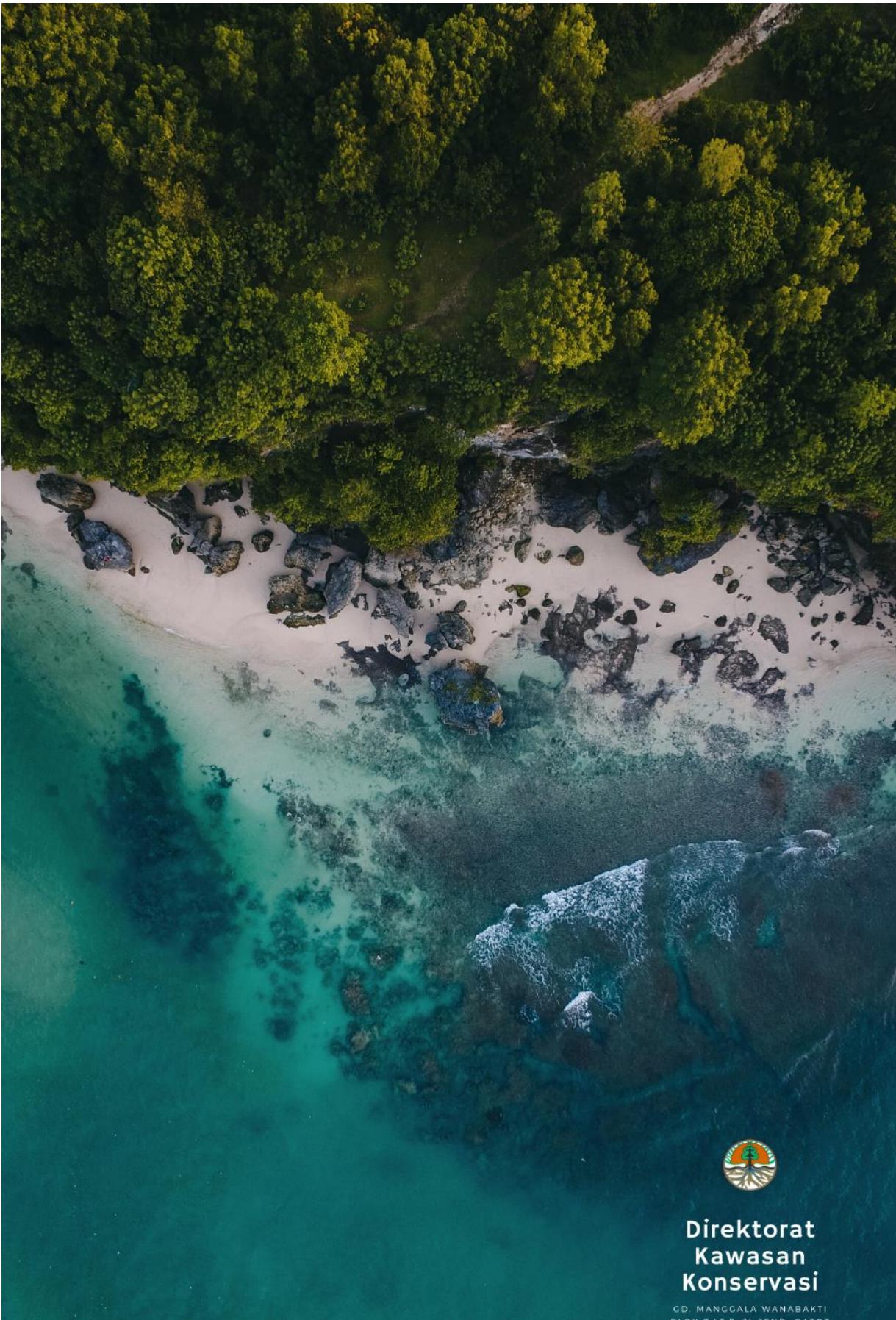
Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH
029.05.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	24.770.605.000
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	8.640.261.000
5419.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	5.163.131.000
5419.950.003	Direktorat Kawasan Konservasi	5.163.131.000
058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	5.163.131.000
A	Penyusunan Program Anggaran	301.000.000
B	Penyusunan LKj, LK Semeter I dan Tahunan	159.000.000
C	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	300.000.000
D	Penatausahaan BMN	120.000.000
E	Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip	60.000.000
F	Penyelenggaraan SPIP	188.501.000
G	Pembinaan Pegawai	4.034.630.000
5419.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.810.990.000
5419.951.003	Direktorat Kawasan Konservasi	1.810.990.000
054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1.810.990.000
A	Penataan Ruangan Direktorat KK	1.810.990.000
5419.994	Layanan Perkantoran	1.666.140.000
5419.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.666.140.000
A	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	587.140.000
B	Langganan Daya dan Jasa	499.200.000

C	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	525.320.000
D	Administrasi Pelaksanaan Operasional Kantor	54.480.000
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	16.130.344.000
5421,004	Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi	6.030.344.000
5421.004.001	Dokumen Luas Area Kawasan Konservasi Yang Ditangani Permasalahannya	2.802.212.000
051	Laporan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	2.150.000.000
A	Pembuatan NSPK	150.000.000
B	Bimbingan Teknis penyelesaian konflik tenurial di KK	200.000.000
C	Koordinasi, Supervisi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial di KK	1.650.000.000
D	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penyelesaian Konflik Tenurial di KK	150.000.000
054	Bimbingan Teknis dan Supervisi	652.212.000
A	Koordinasi, Bimtek dan Supervisi dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekosistem	295.995.000
B	NSPK Pemulihan Ekosistem	156.220.000
C	TOT Pemulihan Ekosistem Perairan Tawar	128.000.000
D	Pemantauan dan penilaian keberhasilan pelaksanaan PE	71.997.000
5421.004.002	Dokumen Desa Yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1.553.802.000
051	Laporan Kemitraan Konservasi	924.331.000
A	Pembuatan NSPK	123.247.000
B	Bimtek Kemitraan Konservasi	308.110.000
C	Supervisi, Koordinasi, dan Monev Kemitraan Konservasi	492.974.000
052	Laporan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di Sekitar KK	629.471.000
A	Penyusunan NSPK	37.900.000

B	Koordinasi dan Supervisi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat	246.488.000
C	In House Training Pemasaran Hasil Usaha Kelompok bagi Pendamping Desa	308.110.000
D	Pemberian Apresiasi Desa Binaan dalam rangka HKAN	36.973.000
5421.004.003	Dokumen Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektifitas Pengelolaannya	1.674.330.000
051	Pengesahan RP dan RPJPN	924.330.000
A	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pengelolaan KK	400.544.000
B	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengelolaan KK	61.622.000
C	Bimtek, Koordinasi dan supervisi efektivitas pengelolaan KK	400.543.000
D	Monitoring dan Evaluasi terkait efektivitas pengelolaan KK	61.621.000
052	Laporan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	500.000.000
A	Pembuatan NSPK	46.100.000
B	Koordinasi, Supervisi, Bimtek dan Fasilitasi penanganan gangguan kawasan konservasi	453.900.000
053	Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan	250.000.000
C	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan	250.000.000
5421.010	<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem</i>	10.100.000.000
051	<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (HLN)</i>	9.500.000.000
A	<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (HLN)</i>	9.500.000.000
052	Dana Pendamping BCCCP-GLE (RMP)	600.000.000
A	Dana Pendamping BCCCP-GLE (RMP)	497.540.000

B	Rapat Koordinasi National Project Management Unit	102.460.000
---	---	-------------



Direktorat
Kawasan
Konservasi

GD. MANGGALA WANABAKTI
BLOK Z LT. 2 JL. JEND. S. C. GATOT